

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh:

**SITI NOVIA SARI  
(01021381520061)**

**Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,**  
**DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh:

Nama : Siti Novia Sari  
NIM : 01021381520061  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 29 Juli 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 29 Juli 2019

**Ketua**

**Anggota**

**Anggota**



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015



Drs. Harunnurasyid, M.Com  
NIP. 196002091989031001



Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si  
NIP. 197306072002121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001



Scanned with  
CamScanner

**Lembar Persetujuan Ujian Komprehensif**

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap  
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Selatan

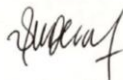
Disusun Oleh:

Nama : Siti Novia Sari  
Nim : 01021181520061  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 15-07-19

  
Ketua : Dr. Anna Yulianita, S.E, M.Si  
NIP.197007162008012015

Tanggal 20-07-19

  
Anggota : Drs. Harunnurasyid, M.Com  
NIP.196002091989031001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Novia Sari  
Nim : 01021381520061  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan”

Pembimbing :

Ketua : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si

Anggota : Drs. Harunnurasyid, M.Com

Tanggal Ujian : 29 Juli 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 29 Juli 2019

Pembuat Pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
DE38FAFF601065251  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Siti Novia Sari  
01021381520061

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan”**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana ekonomi program strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat doa, bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua saran dan kritik yang bersifat membangun kepada pembimbing dan penguji selama penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Palembang, Juli 2019

Siti Novia Sari

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>III</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 TujuanPenelitian .....	10
1.4 ManfaatPenelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah.....	12
2.1.2 Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah.....	14
2.1.3 Fungsi Pengeluaran Pemerintah .....	15
2.1.4 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah .....	16
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	19
2.3 Pendapatan Daerah.....	20
2.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	21
2.5 Retribusi Daerah .....	21
2.5.1 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan .....	21
2.5.2 Lain-lain PAD yang sah .....	22
2.6 Dana Perimbangan .....	22
2.6.1 Dana Bagi Hasil (DBH).....	23
2.6.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....	23

2.6.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	24
2.7 Jumlah Penduduk .....	25
2.8 Pertumbuhan Ekonomi .....	25
2.9 Hubungan Antar Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pemerintah .....	28
2.9.1 Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah .....	28
2.9.2 Dana Perimbangan dan Pengeluaran Pemerintah .....	29
2.9.3 Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah .....	29
2.10 Penelitian Terdahulu .....	30
2.11 Kerangka Pikir .....	33
2.12 Hipotesis .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.3 Variabel Penelitian.....	36
3.4 Teknik Analisis .....	37
3.4.1 Permodelan Data Penel .....	38
3.4.2 Ikhtisar Pemilihan Model .....	39
3.4.3 Uji Signifikansi .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	44
4.1.1 Letak Wilayah Sumatera Selatan .....	44
4.1.2 Tingkat Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan	45
4.1.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	47
4.1.3.1 Estimasi Model Regresi Data Penel dengan <i>Common Effect</i>	47
4.1.3.2 Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Metode <i>Fixed Effect Model</i> .....	48
4.1.3.3 Estimasi Model Regresi Data Penel dengan Metode <i>Random Effect Model</i> .....	49

4.1.3.4 Uji Chow .....	50
4.1.3.5 Uji Hausman .....	50
4.1.4.6 Uji Langrange Multiplie (LM) .....	51
4.1.3.7 Ikhtisar Pemilihan Model Akhir .....	52
4.1.4 Hasil Pengujian Statistik .....	54
4.1.4.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) .....	54
4.1.4.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) .....	55
4.1.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	56
4.2 Pembahasan .....	57
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 dan 2013 .....	3
Tabel 1.2	Pengeluaran, Pendapatan Asli Daerah(PAD), dan Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan 2017 .....	7
Tabel 1.3	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan 2017 .....	9
Tabel 4.1	Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Jumlah Penduduk Tahun 2014-2018 .....	46
Tabel 4.2	Hasil Regresi Menggunakan Metode <i>Common Effect</i> .....	47
Tabel 4.3	Hasil Regresi Menggunakan Metode <i>Fixed Effect</i> .....	48
Tabel 4.4	Hasil Regresi Menggunakan Metode <i>Random Effect Model</i> .....	49
Tabel 4.5	Hasil Regresi Menggunakan Uji Chow .....	50
Tabel 4.6	Hasil Regresi Menggunakan Uji Hausman .....	51
Tabel 4.7	Hasil Regresi Menggunakan Langrange Multiplie (LM) .....	52

**ABSTRAK**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN**

Oleh:

Siti Novia Sari; Anna Yulianita; Harunnurasyid

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2014-2018. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode OLS (*Ordinary Least Square*). Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan Tahun 2014-2018. Nilai koefisien determinasi keterkaitan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 sebesar 97.05 persen.

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, OLS (Ordinary Least Square)*

Ketua



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP.197007162008012015

Anggota,



Drs. Harunnurasyid, M. Com  
NIP.196002091989031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP: 197304062010121001

ABSTRACT

**THE EFFECT OF ORIGINAL REGIONAL INCOME, BALANCE FUND,  
AND NUMBER OF POPULATION ON THE EXPENDITURE OF  
DISTRICT AND CITY GOVERNMENTS IN SOUTH SUMATERA**

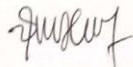
By:

Siti Novia Sari; Anna Yulianita; Harunnurasyid

This study aims to analyze the effect of Local Revenue, Balancing Funds and Population on Expenditures of Regency and City Governments in South Sumatra. The data used in this study is secondary data from 2014-2018. The analysis technique used is the OLS (Ordinary Least Square) method. Based on the results of the analysis, it can be seen that the variables of Regional Original Income, Balancing Funds and population have a positive effect on the Expenditure of Regency and City Governments in South Sumatra in 2014-2018. The coefficient of determination of the relationship between the variables of Regional Original Revenue, Balancing Funds, and Population Amount of Expenditures of Regency and City Governments in South Sumatra in 2014-2018 was 97.05 percent.

Keywords: *Regional Original Income, Balance Funds, Population, Government Expenditures, OLS (Ordinary Least Square)*

Ketua



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP.197007162008012015

Anggota,



Drs. Harunnurasyid, M. Com  
NIP.196002091989031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP: 197304062010121001

v



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara yang berkembang, pemerintah Indonesia memiliki peran penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai pembangunan ekonomi tersebut.

Pengeluaran pemerintah termasuk bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang tercermin di dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Menurut Tuasikal (2008) penyusunan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki berbagai permasalahan, salah satunya dalam pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah yang diperuntukkan untuk kepentingan publik, baik dalam alokasi dana untuk belanja langsung maupun belanja tak langsung. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat harus berdasarkan azas desentralisasi. Kepala daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan

keuangan (*grant*) atau dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah kemudian di revisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk menggunakan segala bentuk sumber daya yang ada di wilayahnya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam (Lela, 2007).

Pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah, hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pengambilan keputusan pengeluaran sektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat, yang terdiri dari dana perimbangan termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain dana perimbangan pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan Lain-lain Pendapatan (Cardiman, 2006).

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Kebijakan desentralisasi telah menjadi pilihan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya tidak terkecuali di Indonesia. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat

meningkatkan pelayanan diberbagai sektor terutama pada sektor publik (Haryanto, 2005).

Tabel 1.1 Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 dan 2018

(dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah		Dana Perimbangan	
	2012	2018	2012	2018	2012	2018
Ogan Komering Ulu	14,799	41,180	42,913	159,534	706,157	910,502
Ogan Komering Ilir	9,132	51,503	41,061	356,429	1,016,000	1,582,000
Muara Enim	17,539	57,299	82,716	171,691	1,122,000	1,520,000
Lahat	17,000	39,467	76,525	121,765	851,936	1,297,000
Musi Rawas	9,847	37,541	76,131	121,862	1.052,000	1,283,000
Musi Banyuasin	19,850	72,700	88,207	212,733	1,959,000	2,150,000
Banyuasin	13,487	61,394	31,189	110,633	974,938	1,423,000
OKU Selatan	4,971	9,255	13,207	41,950	557,688	890,540
OKU Timur	4,758	21,578	23,041	73,129	730,698	1,197,000
Ogan Ilir	17,908	111,401	30,134	203,562	719,563	1,038,000
Empat Lawang	5,425	12,402	14,603	42,061	460,302	732,908
PALI	0	25,500	0	82,956	0	1,037,000
Musi Rawas Utara	0	11,999	0	35,659	0	758,031
Palembang	277,576	703,685	458,534	1,055,000	1,171,000	1,995,000
Prabumulih	8,072	25,045	26,877	114,058	483,288	703,663
Pagar Alam	2,041	5,224	25,966	62,107	435,401	711,758
Lubuk Linggau	9,328	51,748	35,019	114,914	480,395	726,166
Sumatera Selatan	1,724,00	2,324,00	1,899,000	3,607,000	2,205,000	3,169,000

Sumber : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) (diakses 1 Oktober 2018)

Halim (2001) mengatakan untuk menuju kemandirian daerah yang baik, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik di daerah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan pada tahun 2012 sebesar 1,899 juta

rupiah, dibandingkan tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan naik sebesar 3,607 juta rupiah, dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa Kota Palembang memiliki Pendapatan Asli Daerah terbesar dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2012 dan 2018. Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu transformasi paradigma dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab agar hasilnya dapat diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi di daerah tersebut (Mardiasmo, 2002: 20). Tujuan utama melaksanakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga dalam bentuk finansial. Meski demikian pemerintah pusat tetap memberikan dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke pemerintah daerah. Dana perimbangan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 sebesar 2,205 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 3,169 juta rupiah. Dana perimbangan terbesar pada tahun 2012 dan 2018 terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, kemudian oleh pemerintah daerah dilaporkan dan diperhitungkan anggarannya. Tujuan transfer tersebut untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Selain itu Hariyanto (2006) menyimpulkan bahwa salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.

Henri (2009) menyatakan bahwa konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Akan tetapi ada fakta lain, bahwa daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung jika hanya mengandalkan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dengan pemberian bantuan untuk keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan (Hariyanto, 2005).



Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 sebesar 1,724 juta rupiah meningkat pada tahun 2018 sebesar 2,324 juta rupiah. Oleh karena itu, dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai daerahnya melalui sumber-sumber keuangan daerah yang dikuasainya. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah tersebut (Halim, 2001).

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota, memiliki pengeluaran pemerintahan yang masing-masing berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Pengeluaran pemerintah di daerah dapat dilihat dari penerimaan potensi daerah yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi ada fakta bahwa daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan jika hanya mengandalkan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan dalam keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan.

Tabel 1.2 Pengeluaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan 2017

(dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Pengeluaran		Pendapatan Asli Daerah		Dana Perimbangan	
	2013	2017	2013	2017	2013	2017
Ogan Komering Ulu	6,484	7,690	42,869	81,066	814,038	945,991
Ogan Komering Ilir	11,250	6,000	54,165	309,041	1,199,000	1,544,000
Muara Enim	38,126	271,300	101,100	161,959	1,305,000	1,846,000
Lahat	10,000	5,000	62,156	134,434	1,001,000	1,309,000
Musi Rawas	22,500	36,393	90,319	115,000	1,308,000	1,169,000
Musi Banyuasin	64,000	27,000	105,766	203,693	2,452,000	2,286,000
Banyuasin	19,267	5,000	39,342	107,759	1,213,000	1,424,000
OKU Selatan	1,500	9,000	13,444	42,495	659,438	845,275
OKU Timur	2,628	2,544	30,863	64,785	883,951	1,159,000
Ogan Ilir	28,089	800	63,895	283,501	819,828	1,068,000
Empat Lawang	2,000	24,511	16,603	35,332	565,240	692,224
PALI	0	53,500	0	56,924	0	688,268
Musi Rawas Utara	0	1,000	0	34,120	0	649,081
Palembang	81,088	59,496	509,788	894,010	1,474,000	1,945,000
Prabumulih	15,646	10,000	33,864	104,330	562,740	729,248
Pagar Alam	20,131	37,200	26,170	52,126	501,227	641,803
Lubuk Linggau	5,790	44,650	37,860	82,747	534,839	686,961
Sumatera Selatan	328,499	601,055	2,287,000	2,763,000	2,644,000	19,632,000

Sumber : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) (diakses 1 Oktober 2018)

Dana perimbangan pada tahun 2013 sebesar 2,644 juta rupiah, dana perimbangan terbesar terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 2,452 juta rupiah, dapat dilihat pada Tabel 1.2. Dana perimbangan tersebut diberikan sesuai dengan potensi daerah masing-masing atau arti lainnya daerah yang satu tidak sama dengan daerah yang lainnya, makin besar potensi daerah tersebut maka semakin besar dana perimbangan yang diberikan untuk membiayai pengeluarannya.

Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 di Sumatera Selatan sebesar 2,28 persen, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,76 persen. Dapat dilihat pada Tabel 1.2 bahwa Kota Palembang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2013 dan 2017. Dana Perimbangan di Sumatera Selatan pada tahun 2013 sebesar 2,64 persen, sedangkan pada tahun 2017 naik sebesar 19,63 persen. Kabupaten Musi Banyuasin menerima dana perimbangan terbesar sebesar 2,286 juta rupiah.

Dana perimbangan diberikan untuk membantu daerah dalam mengatasi ketimpangan pendanaan di daerah. Dana perimbangan diberikan kepada daerah dengan melihat potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Keuangan Negara (Rahmawati, 2010).

Selama tahun 2013 dan 2017 persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan sebesar 16,30 persen, tertinggi yaitu Kabupaten Empat Lawang dengan persentase pertumbuhan pengeluaran sebesar 87,10 persen, disusul oleh Kota Lubuk Linggau sebesar 66,42 persen dan Kabupaten Muara Enim sebesar 63,32 persen.

Tabel 1.3 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan 2017

Kabupaten/Kota	Pengeluaran 2013 (Juta Rupiah)		Pengeluaran 2017 (Juta Rupiah)		r (2013-2017) (%)	
	Total	Per Kapita	Total	Per Kapita	Total	Per Kapita
Ogan Komering Ulu	6,484	19,070	7,690	21,415	4,35	2,94
Ogan Komering Ilir	11,250	14,707	6,000	7,414	14,54	15,73
Muara Enim	38,126	65,553	271,300	438,409	63,32	60,81
Lahat	10,000	26,001	5,000	12,453	15,91	16,80
Musi Rawas	22,500	60,208	36,393	92,278	12,77	11,26
Musi Banyuasin	64,000	108,035	27,000	42,871	19,40	20,63
Banyuasin	19,267	24,441	5,000	5,997	28,62	29,61
OKU Selatan	1,500	4,481	9,000	25,501	56,50	54,44
OKU Timur	2,628	4,140	2,544	3,834	0,80	1,90
Ogan Ilir	28,089	70,522	8,000	19,057	58,91	27,90
Empat Lawang	2,000	8,631	24,511	10,032	87,10	38,31
PALI	0	0	53,500	28,970	0	0
Musi Rawas Utara	0	0	1,000	5,329	0	0
Palembang	81,088	52,795	59,496	36,655	7,44	8,71
Prabumulih	15,646	91,071	10,000	54,906	10,58	11,88
Pagar Alam	20,131	153,554	37,200	272,318	16,59	15,39
Lubuk Linggau	5,790	27,183	44,650	197,564	66,42	64,19
Sumatera Selatan	328,499	730,398	601,055	1,275,010	16,30	14,94

Sumber : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) data di olah (diakses 1 Oktober 2018)

Pengeluaran Per kapita Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan dilihat dari persentase pertumbuhan ( r ), pada r (2013-2017) terdapat penurunan dan kenaikan yaitu pada Kabupaten OKU Timur memiliki pengeluaran Per kapita terkecil sebesar 1,90 persen dan disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 2,94 persen, sedangkan Kota Lubuk Linggau memiliki pengeluaran Per kapita terbesar yaitu sebesar 64,19 persen dan disusul oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 60,81 persen, pada Tabel 1.3. Penurunan dan kenaikan pengeluaran

pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi di daerah tersebut, maka dapat diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pengeluaran pemerintah 17 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa variabel tersebut diduga mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan tahun anggaran 2014-2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan studi kasus pembaca dan acuan bagi mahasiswa dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan UNSRI sebagai bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca,

khususnya mengenai seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2014-2018, dan dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Sumatera Selatan tahun anggaran 2014-2018, selanjutnya pemerintah dapat mempertimbangkan dalam penyusunan kebijakan fiskalnya (keuangannya) sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari.1997. *Analisis Regresi : Teori, Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE
- Anna Yulianita. 2009. “Analisis Sektor Unggulan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya*.
- Anitasari Merri dan Ahmad Soleh. 2012. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dan Universitas Dehasen Bengkulu*.
- Basri, Zainal, dan Yuswan Subri Mulyadi, 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Boediono, 1999:81, *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama BPFE, Yogyakarta.
- Boediono, 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan ke 8, Edisi 10. BP-FE. UGM Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provisnis Sumatera Selatan : *Sumsel Dalam Angka 2013-2017*.
- Cardiman, 2006. “*Strategi Alokasi Belanja Publik Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”. PascaSarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia : *APBD Tahun 2013-2017*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan : *UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Gujarati, Damodar.2012. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Helmi, Abu. 2003. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap PDRB di Kalimantan Timur*. LEPHAS. Makassar.
- Halim, Abdul. 2001. “*Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*” Kompak. STIE Yogyakarta. 127-146.

- Henri, Edison H, Panggabean. 2009. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir*“. Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Hariyanto, Ronald. 2006. “*Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Periode 2000-2002*”. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Haryanto, Junison. 2005. “Analisis Hubungan Antar Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin”. *Kajian ekonomi Vol. 4 No. 1 2005 : 56 – 80*.
- Hidayat Paidi dan Rikwan E.S. Manik. 2010. “Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara“ *Jurnal keuangan dan bisnis Vol 2 No. 1. Sumatera Utara*.
- Jhingan L M 1994. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta. Rajawali Press.
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pebangunan*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Kopanaka Agniezka. 2017. “Local Governments Revenue and Expenditure Autonomy as a Determinant of Local Public Spending on culture. An Analysis for Polish Rural Municipalities“ *Journal of Multidisciplinary Studies Faculty of Economic Science, University of Warsaw. Vol.5, Nr.1*.
- Lela, Dina Pertiwi. 2007. “Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah“ *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 2, Hal 123-139*.
- Lojanica Nemanja. 2015. “Government Expenditure and Government Revenue- The Causality on The Example of The Republic Serbia“ *Journal Management International Conference. University of Kragujevac, Faculty of Economics, Republic of Serbia*.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*.



- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar. 2017. “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung” *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas BSI, Bandung*.
- M. Zahari MS. 2017. “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi” *Journal of Economics and Business. Vol.1 No. 1. Jambi*.
- Nurlis. 2016. “ The Factors Affecting of The Capital Expenditure Allocation Case : The Local Government of Indonesia “ *Journal of Finance and Accounting. Vol. 7, No. 1. Hal. 2222-1697*.
- Rahmawati, Indah, 2010. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. “Kontribusi Pajak Daerah Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)” *Jurnal Universitas Indonesia (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Sabir dkk. 2013. “Local Government Expenditure, Economic Growth and Income Inequality in South Sulawesi Province“ *Journal of Applied Economics and Business University of Hasanuddin. Indonesia*.
- Sodik, Jamzani. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 1*.
- Sukimo, S .. 2006 *Makroekonomi*, Rajan Grafindo Persada , Jakarta.
- Supranto, J.1983. *Ekonometrika*. Jakarta: BPFE-UI.

Suwandi. 2015. “*Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*”, Ed.1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.

Tuasikal, Askam. 2008. “Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia“ *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 1, No. 1. Hal. 142-155.*

Yunoue Hideo dan Haruaki Hirota. 2012. “Local Government Expenditure And Council Size: Quasi-experimental evidence from Japan“ *Journal University of Commerce.Chiba.*